

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan elemen penting dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia secara menyeluruh guna meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja, serta menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan merata, baik secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, tenaga kerja perlu diberikan kesempatan kerja yang setara bagi semua gender dan dilindungi hak – haknya, terutama dalam hal jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut Undang – Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 3 Tahun 2003, pekerja atau buruh adalah setiap individu yang melakukan pekerjaan dengan menerima gaji atau kompensasi dalam bentuk lain.

Peralihan tenaga kerja dari sektor agraris ke sektor industri berdampak pada perubahan hubungan antara pemilik modal atau pemilik tanah dengan para pekerja. Pada sektor industri, relasi produksi antara pemilik modal dan buruh dalam model produksi industrial hanya demi kepentingan ekonomi dan tidak melibatkan perlindungan politik. Hubungan timbal balik antara pekerja dan pengusaha/petinggi harus saling dipenuhi seperti yang telah tertuang dalam kontrak kerja, pekerja memenuhi kewajiban tugas yang diberikan perusahaan atau lembaga lalu pengusaha/petinggi

berkewajiban meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melindungi hak – hak mereka. Timbal balik ini hasil dari produktivitas para pekerja yang wajib diberikan oleh pengusaha/petinggi. Pemerintah dalam hal ini juga memiliki kewewenangan dalam mengatur upah pekerja agar standar kehidupan pekerja layak, serta dapat memutar roda perekonomian dan pemenuhan gizi tiap individu.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia terdiri dari 139,39 juta jiwa laki-laki dan 136,38 juta jiwa perempuan. Tingginya jumlah penduduk perempuan ini menunjukkan bahwa mereka berperan penting dalam kemajuan negara, terutama di sektor ketenagakerjaan. Namun, sering kali perempuan terkurung oleh konsep domestik dan publik atau dengan istilah lain reproduksi dan produksi. Sebuah konsep yang menggambarkan pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki menempatkan perempuan di ranah domestik atau *private* untuk menjalankan fungsi reproduksi, sementara laki-laki berada di ranah publik untuk melaksanakan fungsi produksi. Tidak hanya itu, masuknya peran perempuan dalam arena produksi atau industrialisasi membawa *stereotype* yang dilekatkan pada perempuan dan menjadi acuan untuk membangun kondisi dan organisasi di lingkungan tempat kerja berlandaskan peran domestik perempuan, seperti perempuan diupah murah karena dianggap lebih lemah atau perempuan mudah dikontrol. Padahal, sejak awal tahun 1980-an telah terdapat diversifikasi lapangan kerja yang ditempuh kaum perempuan. Lalu pada tahun 1990 – 1996, rata – rata

pertumbuhan perempuan yang bekerja naik dari 1,8 persen menjadi 4,2 persen pada tahun 1997 – 1998 (Aris Arif Mundayat, 2008). Tentu implikasi dari hal tersebut adalah ekonomi penghasilan perempuan ikut naik.

Buruh perempuan adalah bagian integral dari tenaga kerja yang berkontribusi dalam berbagai sektor industri, mulai dari produksi hingga layanan. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pemenuhan hak – hak buruh perempuan untuk mencapai kesetaraan gender di tempat kerja. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh peran signifikan yang dimainkan oleh gerakan perempuan, aktivis hak asasi manusia dan organisasi internasional dalam mengadvokasi perlindungan buruh perempuan. Meski sudah ada kemajuan, tantangan yang dihadapi oleh buruh perempuan masih saja sulit untuk dihilangkan. Bahkan hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di negara lain juga masih ditemukan diskriminasi dan tantangan yang harus dihadapi para perempuan. Pada awal krisis pandemi Covid – 19 PBB melaporkan bahwa rata – rata perempuan lebih banyak kehilangan pekerjaan sejak pandemi kemarin. Ditambah tercatat angka pengangguran perempuan di tingkat global mencapai 7,4 persen dan kemungkinan lebih besar angka di lapangan karena banyak perempuan yang bekerja secara informal. Melihat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh para buruh perempuan yang bekerja selama bertahun – tahun tersebut tentu menjadi landasan munculnya berbagai organisasi ataupun perkumpulan buruh perempuan

dalam memperjuangkan haknya. Serikat buruh perempuan pertama kali dibentuk pada tahun 1940 lalu muncul Persatuan Wanita Indonesia (PERWANI), terdapat pula organisasi buruh perempuan berhaluan kiri yang dikenal dengan Barisan Buruh Wanita. Tidak hanya di Indonesia saja perjuangan perempuan dalam memperjuangkan haknya, tetapi beberapa negara di dunia juga menghadapi situasi serupa. Padahal sejak 10 Desember 1948 hak – hak asasi wanita telah dimasukkan dalam *Universal Declaration of Human Rights* melalui *Un General Assembly* dan PBB telah menjadikan isu – isu gender dan kesetaraan menjadi bagian penting dalam program PBB seperti SDGs, WHO dan *UN Women*.

Dalam tataran global terdapat pula ILO (*International Labor Organization*) sebagai organisasi buruh berskala internasional yang beroperasi di bawah PBB. ILO berfokus pada pembuatan konvensi yang menjadi instrumen sah untuk mengatur aspek administrasi perburuhan, kesejahteraan sosial dan hak asasi manusia. Standar ILO mencakup berbagai masalah perburuhan dan sosial, termasuk isu – isu hak asasi manusia. ILO juga menetapkan standar untuk menjadi katalisator bagi tata ekonomi yang baru dan norma – norma hukum yang berdampak kepada pekerja perempuan seperti kesetaraan upah, diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, perlindungan kehamilan, dukungan bagi pekerja dengan tanggung jawab keluarga, serta peraturan khusus terkait kerja malam, bawah tanah dan paruh waktu dan berbagai masalah kesehatan lainnya.

Empat konvensi utama ILO yang melarang diskriminasi berdasarkan

jenis kelamin dan mempromosikan kesetaraan adalah: pertama Konvensi No. 100 (1951) tentang Pengupahan yang Sama Bagi Wanita dan Laki – Laki Untuk Pekerjaan dengan Nilai yang Sama, diratifikasi dalam Undang – Undang (UU) No. 80 Tahun 1957. Kedua, Konvensi No. 111 (1958) tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, diratifikasi pada tahun 1999. Ketiga, Konvensi No. 156 (1981) tentang Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga. Terakhir, Konvensi No.183 (2000) tentang Perlindungan Kehamilan.

Pemerintah Republik Indonesia juga telah menjamin hak dari para buruh sesuai dengan ketentuan UUD 1945 pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Ketentuan yuridis tersebut menjadi landasan yang kuat bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematis dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi dan politik. Selain itu, dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 juga tercantum hak – hak buruh di Indonesia. Namun, dilihat dari faktanya di Indonesia hingga saat ini masih banyak terjadi diskriminasi kepada perempuan.

Munculnya era industrialisasi tentu membuka kesempatan untuk perempuan agar dapat bekerja sebagai buruh. Industri garmen menjadi salah satu sektor industri yang lebih mengandalkan tenaga kerja perempuan karena dianggap memiliki ketelitian yang tinggi, meskipun

disisi lain buruh wanita dipandang tidak produktif karena faktor biologis seperti menstruasi, kehamilan dan menyusui (Murniarti, 2004, 76). Permasalahan yang sering kali terjadi dalam industri garmen ialah ketimpangan imbalan dan penghargaan yang diterima antara pekerja perempuan dan laki-laki. Sering kali ditemukan dalam industri garmen adanya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh para pekerja pria, hingga tuntutan kerja yang sangat berat seperti target produksi 100 hingga 200 pakaian harus terpenuhi dalam satu jam (Hedwich, 2016).

Berdasarkan tinjauan literatur yang menggunakan pendekatan studi kasus terkait industri garmen di Bangladesh oleh Anwari (2017) mengatakan bahwa akumulasi dari industri garmen sebagai kapitalis global terjalin tidak hanya dalam aspek produksi tetapi juga reproduksi sosial tenaga kerja. Pada kasus ini, kapitalis global tidak hanya menciptakan intensitas tenaga kerja dan jumlah pekerjaan, tetapi juga mempengaruhi gender, etnis tenaga kerja, karakteristik proses kerja, mekanisme pengawasan tempat kerja, serta berbagai aspek yang bersinggungan dengan dinamika sosial berdasarkan gender dan etnis, yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan terhadap jenis pekerjaan tertentu dan biaya yang ditetapkan (Anwari 2017, 174). Sejak tahun 2000-an, pekerja perempuan di pabrik-pabrik Bangladesh kerap mengalami pelecehan seksual di lingkungan kerja, sementara beban biaya hidup yang semakin tinggi tidak sebanding dengan pendapatan mereka yang rendah. Tidak hanya di Bangladesh, pada tahun 2017 terdapat pula penelitian di Istanbul oleh

Bazak Can terkait industri garmen di Turki bergantung pada tenaga kerja perempuan dengan upah rendah. Hal ini tidak hanya terjadi di Bangladesh maupun Turki, tetapi terjadi juga di beberapa negara lain, termasuk India dan Indonesia.

Buruh perempuan memiliki keterbatasan dalam menentukan pilihan pekerjaan, yang pada dasarnya disebabkan oleh struktur hubungan patriarki yang masih melekat. Menurut Nancy Fraser (2016) perempuan semakin rentan terhadap penindasan akibat keterkaitan struktural antara kapitalisme dan patriarki yang memengaruhi fungsi reproduksi sosial mereka. Reproduksi sosial adalah proses memastikan adanya anggota masyarakat yang baru untuk menggantikan anggota masyarakat lainnya, contohnya fungsi mengurus rumah tangga. Era globalisasi saat ini telah didominasi oleh kapitalisme neoliberal, di mana konsep ini menggunakan instrumen keuangan untuk mendisiplinkan negara dalam melayani kepentingan swasta dan berakibat pada mengikisnya kekuatan serikat pekerja hingga kondisi kerja para buruh. Kapitalisme neoliberal juga mempengaruhi model ekonomi keluarga yang membuat kebutuhan ekonomi keluarga tidak cukup apabila dipenuhi oleh upah satu pencari nafkah saja, sehingga ibu rumah tangga juga harus bekerja dan menjalani peran ganda. Sedangkan, kapitalis hanya fokus kepada produktivitas kerja dari buruh perempuan tanpa melihat hak dasar atas kesehatan reproduksinya.

Penderitaan yang dirasakan oleh buruh perempuan di Bangladesh dan juga Turki dirasakan pula oleh para buruh perempuan di Indonesia.

Menurut *Better Work Indonesia* (2015) menyatakan bahwasannya 83% pekerja garmen di Indonesia ialah perempuan. Pada tahun 1986 Pemerintah resmi mendirikan PT. Kawasan Berikat Nusantara sebagai kawasan industri baik yang berstatus kawasan berikat maupun non berikat. Menurut data tahun 2018 dari Sekretaris Perusahaan PT Kawasan Berikat Nusantara, terdapat 60 perusahaan yang kebanyakan bergerak di bidang garmen untuk pasar ekspor di KBN Cakung dengan total jumlah pekerja mencapai 38.400 orang, di mana lebih dari 80 persennya adalah pekerja perempuan.

Para buruh perempuan di KBN Cakung harus menghadapi berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang ada di sana. Seperti permasalahan perhitungan upah yang tidak realistis, status buruh kontrak yang lebih dominan, PHK massal yang cukup sering terjadi, belum adanya penerapan kebijakan terkait perlindungan hak maternitas buruh perempuan, bahkan yang terjadi sebaliknya adanya pemutusan kontrak ketika buruh perempuan diketahui hamil atau melahirkan (Wusana, 2017).

Pemerintah yang seharusnya berperan aktif dalam melindungi hak-hak buruh perempuan justru menunjukkan ketidakhadiran dalam menangani permasalahan yang mereka hadapi. Minimnya regulasi yang ditegakkan, kurangnya mekanisme pengawasan, serta absennya kebijakan yang berpihak pada buruh perempuan menunjukkan bahwa negara tidak memiliki niat serius dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dalam kondisi ini, banyak buruh perempuan akhirnya kehilangan kepercayaan

terhadap jalur formal pemerintahan dan mulai bersandar pada gerakan ekstra-parlementer, seperti serikat buruh dan organisasi advokasi. Salah satu organisasi yang aktif dalam memperjuangkan hak buruh perempuan adalah Perempuan Mahardhika.

Gerakan Perempuan Mahardhika merupakan sebuah gerakan yang berdiri sejak tahun 2003 dan bertempat di Jakarta. Gerakan ini diinisiasi oleh aktivis perempuan dari latar belakang yang berbeda, khususnya aktivis buruh dan mahasiswa untuk membicarakan berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Berdirinya Perempuan Mahardhika bertujuan untuk memperjuangkan hak – hak perempuan agar terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender, serta mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Demi mencapai tujuan organisasi, perempuan mahardhika turut bekerjasama oleh organisasi – organisasi perempuan, serikat buruh dan organisasi pro – demokrasi. Perempuan Mahardhika berupaya untuk fokus membantu para kaum buruh perempuan dalam mengatasi permasalahan, yaitu tentang situasi pelecehan seksual pada buruh garmen perempuan dan pemenuhan hak maternitas. Tentunya, langkah yang dilakukan oleh Perempuan Mahardhika menjadi sebuah bukti dari gerakan sosial baru yang bersifat plural (Mahardhika.org).

Gerakan yang digagas oleh Perempuan Mahardhika termasuk dalam kategori gerakan sosial baru yang menekankan pada kesetaraan gender. Sebuah gerakan sosial baru biasanya memiliki tiga ciri khas yang

membedakannya, yakni gerakan yang dilakukan memusatkan perhatian pada isu baru, kepentingan baru dan medan konflik sosial yang baru seperti ekologi dan feminisme. Menurut Pichardo (1997:414) sebagai sebuah gerakan sosial tentunya terdapat empat aspek dan karakteristik khusus dari gerakan sosial baru yaitu, tujuan dan ideologi, taktik, struktur dan partisipasi dari gerakan kontemporer. Dalam taktiknya, Gerakan Perempuan Mahardhika cenderung memilih untuk berada di luar saluran politik normal, gerakan yang dilakukan lebih sering menggunakan taktik memobilisasi opini publik untuk dapat memberikan pengaruh politik, serta cenderung menggunakan aksi demonstrasi yang direncanakan dengan simbol.

Melihat permasalahan yang cukup mendalam dan kompleks di KBN Cakung, menyiratkan adanya kesulitan dalam membangun kesepakatan yang adil melalui perundingan dengan pengusaha. Apabila proses negosiasi dan perundingan yang dilakukan tidak mampu menghadirkan solusi, maka sesuai dengan Undang – Undang Ketenagakerjaan Pasal 137 menyatakan bahwa buruh berhak untuk mengorganisir dan menyelenggarakan aksi mogok kerja. Tercatat aksi mogok di KBN Cakung dimulai pada November 2010 hingga September 2017 (Perempuan Mahardika 2017, 6).

Tabel 1.1 Catatan Aksi Buruh di KBN Cakung

Catatan Aksi Buruh di KBN Cakung	
November 2010	Untuk pertama kalinya, terjadi aksi mogok kerja massal di KBN Cakung (mogok kawasan). Ribuan pekerja dari Aliansi Buruh DKI menuntut

	kenaikan upah minimum.
Desember 2010	Aksi mogok kerja massal di KBN Cakung dilanjutkan, dengan tuntutan upah minimum yang sama, tetapi kali ini diprakarsai oleh FBLP.
Januari 2011	Aksi mogok kerja dilakukan oleh buruh PT Rismar Daewoo Apparel. Perusahaan diduga sengaja tidak membayar upah lembur selama dua tahun, mengabaikan hak cuti buruh perempuan, serta menerapkan kebijakan yang memaksa buruh bekerja pada hari Minggu.
Januari 2012	Ribuan buruh dari berbagai perusahaan di KBN Cakung bersatu dalam aksi menuntut kesejahteraan buruh, khususnya meminta kenaikan upah minimum di DKI Jakarta.
Juli 2013	Ratusan buruh melakukan aksi mogok bersama untuk menuntut kenaikan uang makan dan transportasi menjadi Rp20.000 per hari, sebagai dampak dari kenaikan harga BBM oleh pemerintah (sebelumnya hanya Rp1.500 per hari).
Oktober 2013	Buruh melakukan aksi bersama untuk menolak tekanan dari perusahaan (PT. Makalot) yang memaksa mereka untuk mengundurkan diri.
Oktober 2013	Mogok nasional diadakan untuk menolak upah rendah yang ditetapkan dalam UMP, serta menentang praktik kerja <i>outsourcing</i> dan kontrak.
Februari 2014	Aksi mogok kerja dilakukan untuk menuntut kenaikan uang makan yang belum dipenuhi dan pembayaran upah lembur yang belum diberikan. Dua perusahaan yang menjadi sasaran aksi adalah PT. Kateksindo Citra Mandiri dan PT. Paku Benang Sari.
2015	Tahun ini penuh dengan gejolak bagi kehidupan buruh, dengan banyaknya aksi yang digelar oleh buruh di KBN. Dua faktor utama yang mendasari situasi ini adalah peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di KBN Cakung dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Juni 2016	Karyawan PT. Woon Indonesia melakukan mogok kerja untuk menuntut pembayaran Tunjangan Hari Raya (2016), pemberian libur hari raya dan perundingan ulang Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Oktober 2016	Buruh PT. Sunshine World melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap tindakan sepihak perusahaan yang memecat

	(PHK) 14 anggota serikat.
Januari 2017	Aksi buruh yang diselenggarakan oleh KSBSI menuntut pemenuhan hak-hak normatif dan menolak tindakan sewenang-wenang terhadap pekerja. Aksi ini khususnya dilakukan di PT. Molax, KBN Cakung.
September 2017	Aksi penolakan terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh PT. Woon Indonesia. Buruh menuntut agar perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai PHK.

Sumber: Perempuan Mahardhika, 2017

Meskipun permasalahan yang terjadi di KBN Cakung sudah masuk ke dalam tahapan aksi mogok kerja, tetapi langkah – langkah musyawarah dan advokasi masih dapat menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan buruh perempuan yang ada di KBN Cakung.

Menurut Sheila Espine – Villaluz advokasi adalah aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Advokasi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan buruh perempuan di KBN Cakung adalah advokasi yang bertujuan untuk memperjuangkan keadilan sosial. Di mana advokasi yang dirumuskan merupakan praktek perjuangan secara sistematis dalam rangka mendorong terwujudnya keadilan sosial melalui perubahan atau perumusan kebijakan publik.

Menurut Danialsyah & Zayyan Zahra (2022) advokasi berkaitan erat

dengan perubahan yang mengubah beberapa kebijakan, regulasi dan cara badan-badan perwakilan melakukan kebijakan. Sebelum melakukan advokasi, kita perlu mendalami sebuah masalah yang ingin kita identifikasi, biasanya yang menjadi tolak ukur dalam melakukan advokasi ialah audiensi, aktualisasi, dampak, urgensi, relevansi, sensitivitas dan lain – lain. Proses advokasi tidak bisa sembarangan, perlu melakukan analisis SWOT dan prinsip *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time – bound)* dalam pelaksanaannya. Pemilihan data dukungan untuk advokasi juga dapat membantu untuk mempermudah proses advokasi itu sendiri. Selain itu, terdapat berbagai macam cara untuk menyampaikan pesan, salah satunya mempengaruhi pendapat masyarakat umum bisa melalui kampanye, baliho, poster, iklan, siaran pers, radio dan lain – lain. Tujuan dilaksanakannya kegiatan advokasi yakni untuk mempengaruhi pembuat pelaksana kebijakan dengan cara negosiasi, lobi, mediasi dan kolaborasi. Terakhir, dalam mengajukan konsep advokasi kita dapat melakukannya dengan *policy brief* dan *legal drafting* (Kebijakan Kesehatan Indonesia, 2019).

Gerakan Perempuan Mahardhika dalam kegiatannya telah berhasil mengkaji dan mengurai pengalaman yang dirasakan dan dialami oleh 773 buruh perempuan yang bekerja di 38 perusahaan garmen di KBN Cakung. Di mana dalam temuannya ditemukan sebanyak 56,5% atau sebesar 437 dari 773 buruh perempuan tersebut pernah mengalami pelecehan seksual. Sayangnya, dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut masih terdapat

berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Gerakan Perempuan Mahardhika (Wusana, 2017).

Melalui penelitian ini, penulis akan menggali lebih dalam mengenai perjuangan buruh perempuan dalam industri garmen di KBN Cakung. Alasan penulis memilih topik ini adalah karena permasalahan pemenuhan hak – hak buruh perempuan masih marak terjadi di Indonesia ditambah dengan meningkatnya kasus pelecehan seksual yang dialami oleh para buruh di lingkungan kerja. Salah satu lingkungan kerja yang masih cukup banyak terdapat permasalahan terkait pelecehan seksual dan buruh perempuan adalah industri garmen di KBN Cakung, hal ini dibuktikan dengan seringnya aksi mogok kerja dan demo kepada KBN Cakung. Padahal, KBN Cakung menjadi salah satu kawasan industri yang besar karena terdapat puluhan perusahaan di dalamnya. Sedangkan, alasan penulis memilih gerakan yang dilakukan oleh Perempuan Mahardhika sebagai topik penelitian karena Perempuan Mahardhika merupakan salah satu organisasi yang masih bertahan hingga saat ini dalam memperjuangkan hak – hak perempuan, terutama para buruh perempuan. Perempuan Mahardhika juga menjadi organisasi yang terus berupaya untuk memperjuangkan kesetaraan pada perempuan melalui salah satu cara yaitu kaderisasi dan pencerdasan kepada masyarakat umum.

Penulis akan mengkaji tantangan yang dihadapi oleh buruh perempuan serta menjelajahi peran dan upaya Gerakan Perempuan Mahardhika dalam mengadvokasi hak – hak buruh perempuan dalam sektor ini. Melalui

pemahaman lebih tentang realitas yang dihadapi buruh perempuan di industri garmen dan peran yang dimainkan oleh Gerakan Perempuan Mahardhika. Berdasarkan hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang “Gerakan Perempuan Mahardhika dalam Advokasi Sosial Pemenuhan Hak – Hak Normatif Buruh Perempuan”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan ketidakadilan dan tidak adanya lingkungan kerja yang nyaman bagi perempuan menjadi masalah yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Perempuan Mahardhika sebagai organisasi yang berjuang untuk kemerdekaan perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi dari budaya menindas dan kemiskinan terus melakukan upaya untuk dapat memperjuangkan kemerdekaan perempuan terkhususnya para kaum buruh yang sering kali direndahkan dan mendapatkan ketidakadilan yang tidak sebanding dengan kinerja yang telah dilakukan oleh para buruh itu sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi advokasi yang dilakukan oleh Gerakan Perempuan Mahardhika dalam pemenuhan hak – hak normatif buruh perempuan?
2. Tantangan apa saja yang dihadapi oleh Gerakan Perempuan Mahardhika dalam mengadvokasi pemenuhan hak – hak normatif buruh perempuan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis upaya advokasi yang dilakukan oleh Gerakan Perempuan Mahardhika dalam pemenuhan hak – hak normatif buruh perempuan.
2. Menganalisis tantangan yang dihadapi oleh Gerakan Perempuan Mahardhika dalam melakukan upaya advokasi.
3. Memetakan peran Organisasi Perempuan Mahardhika sebagai gerakan sosial dalam pemenuhan hak – hak buruh perempuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yakni secara teoritis dan juga secara praktis, yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara akademis dengan dilakukannya penelitian ini dapat menambah wawasan intelektual tentang peran dari gerakan sosial yakni dalam hal ini gerakan sosial yang dilakukan oleh Perempuan Mahardhika dalam upaya memperjuangkan hak – hak buruh perempuan. Selain itu, manfaat teoritis lainnya adalah penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana pembelajaran dan pengetahuan, serta menemukan hambatan dalam melakukan gerakan sosial untuk pemenuhan hak – hak buruh perempuan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis dapat dijadikan bahan evaluasi maupun

pertimbangan bagi sebuah organisasi atau gerakan sosial dalam melakukan upaya advokasi untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi penelitian sejenis, diantaranya:

1. Jurnal “Peran Gerakan Perempuan Mahardhika dalam Melawan Diskriminasi dari Budaya Menindas dan Kemiskinan” oleh Astin Julia Rosa, Dewi Septiani, Faesal Mubarak, Mutiara Safina dan Vivih Ashifa Haq dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dan berusaha memusatkan pandangan pada masalah yang bersifat aktual. Peneliti menggunakan teori feminisme sosialis yang mana gerakan feminisme sosialis adalah gerakan perubahan struktur patriarki yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan gender. Di mana pada penjelasan feminisme sosialis perempuan harus mempunyai dua beban diantaranya wilayah rumah untuk mengurus keluarga dan harus bekerja. *Standpoint Theory* atau teori sudut pandang yang dikembangkan dengan mengkaji

bagaimana keadaan seseorang mempengaruhi aktivitas individu dalam memahami dan membentuk dunia sosialnya. Perempuan Mahardhika hadir untuk membebaskan kelompok perempuan yang melawan struktur patriarki.

Penelitian ini berfokus pada Perempuan Mahardhika sebagai organisasi kerakyatan yang hadir untuk menyuarakan isu-isu kesetaraan perempuan dan juga akomodasi yang harapannya dapat mengakomodir semua permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan termasuk persoalan buruh perempuan dan kesetaraan hak pekerja yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Perempuan Mahardhika juga melakukan gerakan dalam melawan kekerasan, diskriminasi budaya dan kemiskinan, serta masih belum adanya payung hukum yang memadai. Salah satunya adalah mengurai pengalaman dari 773 buruh perempuan dari tenaga kerja perempuan yang bekerja di KBN Cakung. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa Perempuan Mahardhika sering melakukan sosialisasi dan juga pendidikan politik dalam memberdayakan kaum perempuan, hingga pelatihan dasar buruh perempuan. Perempuan Mahardhika juga berupaya melakukan konsolidasi secara *top-down* dan terus menekan pemerintah agar kebijakan yang diberlakukan tidak bias gender.

2. Kajian Kekerasan Berbasis Gender di KBN Cakung terkait “Pelecehan Seksual dan Pengabaian Hak Maternitas Pada Buruh Garmen” pada tahun 2018. Di mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Perempuan Mahardhika ini merupakan salah satu dari sekian perjalanan panjang interaksi Perempuan Mahardhika dengan teman-teman buruh perempuan, khususnya mereka yang bekerja menjadi buruh garmen di KBN Cakung. Perempuan Mahardhika berusaha untuk mengumpulkan data dan menghimpun suara para buruh perempuan yang menjadi landasan penulisan kajian ini. Kemudian data tersebut diolah dalam proses kajian dan ditemukan berbagai permasalahan. Di mana dalam kajiannya menjelaskan terkait fakta dan situasi yang terjadi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para kaum buruh perempuan di KBN Cakung.

Penelitian ini juga menjelaskan terkait sejarah pergerakan para buruh di KBN Cakung yang sudah sering melakukan aksi dan mogok kerja. Dilanjut dengan profil buruh perempuan di KBN Cakung dan mengkaji terkait permasalahan yang terjadi dalam KBN Cakung, yaitu pelecehan seksual pada buruh perempuan, hak maternitas buruh perempuan, relasi struktural dan kesadaran buruh garmen perempuan. Pada akhir kajian Perempuan Mahardhika juga memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan buruh perempuan. Perempuan

Mahardhika memberikan beberapa rekomendasi untuk pemerintah, perusahaan dan untuk serikat buruh.

3. Jurnal “Advokasi Hak Penyandang Disabilitas sebagai Gerakan Sosial Baru di Kota Semarang” yang ditulis oleh Ucca Arawindha dari Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aksi sosial yang dilakukan oleh Komunitas Sahabat Difabel (KSD) dalam mengadvokasikan hak-hak dari para penyandang disabilitas yang berada di Kota Semarang. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan menelusuri data sekunder melalui BPS Kota Semarang. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa KSD melakukan aksi sosial dalam bentuk gerakan sosial baru dan karakteristik dari gerakan sosial KSD adalah bentuk jaringan interaksi informal karena sifat keanggotaan yang tidak mengikat. Keunikan dari gerakan yang dilakukan oleh KSD Semarang adalah pendiri dari gerakan ini bukanlah seorang penyandang disabilitas. Lalu, aksi sosial yang dilakukan oleh KSD juga beragam, dimulai dari kegiatan yang bersifat *charity*, terapi/rehabilitasi, pendampingan hukum, hingga peningkatan kapasitas untuk memandirikan penyandang disabilitas.

Temuan dan analisis dalam penelitian ini adalah pertama

adanya dinamika terkait permasalahan disabilitas di Kota Semarang, seperti data tentang jumlah penyandang disabilitas yang belum tentu mencerminkan realitas yang sebenarnya. Selain itu, masih pula terdapat pandangan dari masyarakat yang menganggap penyandang disabilitas sebagai objek belas kasihan sehingga keberadaannya cenderung disembunyikan oleh keluarga. Hasil dari penelitian ini juga menemukan bahwa aksi komunitas sahabat difabel Semarang sebagai bentuk gerakan sosial baru. Hal ini dikarenakan, gerakan sosial baru lebih mendasarkan pada isu humanis, kultural dan non-materialistik. Lalu, peneliti juga menganalisis tentang strategi yang digunakan oleh Komunitas Sahabat Difabel (KSD) Semarang dalam melakukan advokasi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Semarang.

Strategi yang dilakukan oleh KSD adalah memobilisasi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya seperti media sosial, sarana dan prasarana dan juga sumber daya berupa kapabilitas sumber daya manusia yang menggerakkan aksi KSD. KSD juga memiliki jejaring yang luas, baik dari kalangan pemerintah maupun dengan swasta, yang mana hal tersebut bermanfaat untuk memobilisasi gerakan melalui kerjasama dengan berbagai pihak tersebut yang berbentuk *charity*, peningkatan *soft skill* partisipan. Kekuatan utama dalam

melakukan mobilisasi sumberdaya oleh sebuah gerakan tidak terlepas dari adanya aktor, yang dalam aksi KSD aktor utamanya adalah *founder* dari KSD. Di mana kegiatan KSD berawal dari aktivitas diskusi pengalaman orang tua yang memiliki anak difabel melalui media sosial hingga saat ini KSD berkembang dengan berbagai aktor penggerak yang memiliki kapasitas organisatoris dan studi disabilitas.

Penelitian sebelumnya telah mencakup berbagai argumen dan gagasan yang dapat dijadikan data pendukung untuk penelitian ini. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis Gerakan Perempuan Mahardhika sebagai gerakan sosial baru yang berkomitmen pada advokasi hak-hak buruh perempuan di industri garmen KBN Cakung. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan mengenai perjuangan Perempuan Mahardhika dalam memperjuangkan hak-hak buruh perempuan. Namun, perbedaannya terletak pada waktu penelitian dan teori yang digunakan, dengan penekanan pada advokasi sosial. Selain membahas sistematika advokasi sosial, penelitian ini juga mengeksplorasi jaringan sekutu dan strategi lobi yang diterapkan.

1.5.2 Kerangka Teori

1.5.2.1 Gerakan Sosial

Robert Miesel (2004) mengatakan bahwa gerakan sosial mengalami dinamika tersendiri dari waktu ke waktu. Seiring perkembangannya terdapat beberapa tokoh yang mendefinisikan gerakan sosial menurut pandangan mereka masing-masing. Robert Miesel mendefinisikan gerakan sosial sebagai seperangkat keyakinan dan tindakan yang terlembagakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan ataupun menghalangi perubahan di dalam sebuah Masyarakat. Menurut Robert Miesel terdapat beberapa ciri karakteristik dari gerakan sosial yaitu gerakan sosial dimengerti dalam hubungannya dengan organisasi dan perilaku organisatoris, lalu gerakan sosial menggunakan cara-cara yang rasional dalam mencapai tujuan dan cita-citanya, gerakan sosial juga mempunyai aktivitas utama yaitu memobilisasi berbagai macam konstituensi dengan berbagai cara untuk dapat memperoleh sumber daya yang dibutuhkan, bentuk dari organisasi dan strategi-strategi penggalangan sumber daya dari sebuah gerakan sosial dengan bentuk-bentuk tindakan yang terlembagakan

dan terakhir karakteristik dari gerakan sosial adalah fenomena perilaku kolektif yang sangat berhubungan dengan suatu gerakan sosial, karena menjadi unsur bagian dari strategi yang digunakan dalam sebuah gerakan.

Gerakan sosial menurut Tarrow memiliki beberapa karakteristik, pertama adalah menyusun aksi disruptive melawan kelompok elite atau penguasa, kelompok-kelompok lain dan aturan-aturan budaya tertentu, karakteristik kedua adalah dilakukan atas nama tuntutan yang sama terhadap lawan, penguasa, dan kelompok elite, karakteristik ketiga adalah berakar pada rasa solidaritas atau identitas kolektif dan terus melanjutkan aksi kolektifnya sampai terjadi suatu gerakan sosial. Pengertian tentang gerakan sosial menurut Tarrow sendiri didasarkan pertimbangan praktis yaitu cakupannya atas unsur-unsur gerakan sosial yang cukup memadai dan mengisyaratkan adanya ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam gerakan.

Dekade 1940 sampai 1950 menjadi periode pertama gerakan sosial yang mana pada periode ini ditandai dengan pandangan negatif mengenai gerakan

sosial kemasyarakatan. Berbeda dengan periode sebelumnya, pada dekade 1960-an teori-teori gerakan sosial didasarkan pada pandangan positif dengan fokus pada perhatian gerakan-gerakan yang terorganisasi serta memiliki strategi yang rasional untuk mengubah kondisi-kondisi struktural tertentu seperti gerakan perjuangan hak-hak sipil, gerakan kemerdekaan dan anti kolonial, gerakan anti-komunis, gerakan mahasiswa, gerakan kiri baru dan sebagainya. Pada periode inilah, tema dari gerakan sosial difokuskan agar mudah dipahami melalui perilaku kolektifnya dan gerakan sosial menempuh cara-cara rasional dalam memperjuangkan cita-cita politiknya, dengan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan (tenaga para aktivis, dana, senjata, media), juga bentuk organisasi dan strategi penggalangan sumber daya, aksi berlangsung dalam struktur dan berbagai fenomena perilaku kolektif.

Pada periode ketiga yang dimulai pada era 1970-an dan setelahnya adalah periode dekonstruksi yang menyoroti fenomena gerakan sosial terkait dengan struktur-struktur individual dan sosial yang tidak selalu memiliki unsur-unsur baku. Pada periode

ini gerakan sosial lebih banyak dimanifestasikan dengan kekuatan ideologi gerakan. Pada periode ini pula muncul sebuah konsep yaitu gerakan sosial baru.

1.5.2.1.1 Gerakan Sosial Baru

Teori gerakan sosial merupakan sebuah teori yang menjelaskan mengenai bentuk perlawanan-perlawanan atas bentuk-bentuk penindasan yang terjadi pada masyarakat kapitalis tahap lanjut. Gerakan sosial baru muncul seiring dengan perkembangan masyarakat. Semakin berkembangnya sebuah masyarakat yang semakin kekininan, tentunya hal tersebut akan merubah bagaimana mengamati bentuk gerakan sosial yang muncul, strategi yang digunakan, serta visi dan perubahan yang ingin dicapai. Pada hakikatnya gerakan sosial baru secara esensial lebih bersifat universal dan diarahkan untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kondisi kehidupan manusia kearah yang lebih baik.

Gerakan sosial baru memiliki beberapa ciri utama, pertama adalah menempatkan aksi gerakan sosial menjadi suatu aksi kolektif yang memiliki nilai positif dan rasional. Kedua, gerakan sosial mengoreksi serta mengkontekstualisasikan teori-teori gerakan

sosial pada era-era sebelumnya. Ketiga, kajian dari gerakan sosial semakin beraneka ragam karena semakin banyaknya praktik gerakan dan studi gerakan sosial di luar wilayah Amerika dan Eropa. Ciri utama yang keempat adalah gerakan sosial baru mampu mengidentifikasi faktor yang memfasilitasi berkembangnya gerakan, kekuatan, kelemahan dan keberhasilan atau ketidakberhasilan dari suatu gerakan sosial (Situmorang, 2007).

Gerakan sosial baru menurut Pichardo (1997:414) menjelaskan bahwa terdapat empat aspek karakteristik khusus yang dapat dilihat dari gerakan sosial baru yaitu:

1. Tujuan dan Ideologi: Gerakan sosial baru memfokuskan pada perhatian terhadap kualitas serta gaya hidup. Nilai-nilai yang ada dalam gerakan sosial baru terpusat pada identitas dan otonomi. Di mana klaim identitas menjadi ciri yang paling terlihat dalam gerakan sosial baru.
2. Taktik: Gerakan sosial baru menggunakan taktik mengganggu (*disruptive tactics*) serta memobilisasi opini publik yang bertujuan untuk

mendapatkan pengaruh publik. Melalui taktik tersebut maka dapat dikatakan gerakan sosial baru lebih memilih berada di luar saluran politik normal.

3. Struktur: Gerakan sosial baru mengorganisir kelompok mereka ke dalam gaya yang fleksibel dan tidak kaku. Seruan yang dilakukan oleh gerakan sosial baru adalah bagaimana mereka dapat memunculkan struktur yang lebih responsif kepada individu, terbuka, desentralis, serta *non* hierarkis. Meskipun pada idealnya gerakan sosial baru mengalami perkembangan yang kearah *modern* di mana kelompok organisasi memiliki sifat yang hierarki sebagai bentuk kinerja yang terpusat.
4. Partisipasi dari Gerakan Kontemporer: Basis partisipan dari gerakan sosial baru adalah mengenai hal ideologi. Menurut Offe (1985) dalam (Sukmana, 2016:139) terdapat tiga sektor partisipan dalam gerakan sosial baru yaitu: kelas menengah baru, elemen kelas menengah lama (pemilik toko, petani dan produser artis), serta populasi orang-orang yang tidak banyak terlibat

dalam pasar kerja (mahasiswa, ibu rumah tangga dan pensiunan).

Gerakan sosial baru juga dapat dikelompokkan menjadi suatu perkumpulan yang inklusif dan diprakarsai aktor-aktor serta diikuti kelompok-kelompok yang secara sadar memobilisasi diri untuk bersama-sama memperjuangkan demokrasi dalam kehidupan setiap hari. Dalam gerakan sosial baru tentunya menekankan pada unsur jaringan yang kuat tetapi interaksinya bersifat informal atau tidak terstruktur, adanya berbagai keyakinan dan solidaritas diantara kelompok atau anggota dalam gerakan, terdapat aksi bersama dengan membawa isu yang bersifat konfliktual dan aksi tuntutan bersifat berkelanjutan tetapi tidak mengikuti prosedur rutin atau sesuai dengan institusi.

Dalam gerakan sosial baru terdapat beberapa pendekatan teori yang dapat digunakan untuk membaca suatu gerakan sosial yaitu:

- a. Teori Keluhan : Menurut beberapa tokoh yaitu Alberto Melucci dan Joe Fowerker mengeluarkan pendapat yang sama bahwa gerakan sosial baru dibentuk dan didorong atas reaksi dari keluhan

baru. Munculnya ketidakseimbangan sosial seringkali menjadi pemicu munculnya keluhan yang dimensinya dapat berupa makro maupun mikro serta menjadi pendorong utama dalam gerakan sosial. Teori keluhan juga didukung oleh Donatella Della Porta dan Mario Diani, yang mengatakan bahwa teori keluhan sangat relevan untuk digunakan dalam memahami dan menjelaskan kemunculan gerakan pada abad ke-20, karena keluhan baru akan selalu memicu terciptanya gerakan baru.

- b. Teori Kesempatan Politik: Teori proses politik adalah sebuah teori yang fokus kepada faktor-faktor yang dapat memungkinkan gerakan sosial berhasil, faktor politik dan ekonomi dianggap jauh lebih penting dibandingkan faktor-faktor personal. Fokus dari teori proses politik adalah lebih banyak koneksi politik daripada sumberdaya material dikarenakan dalam teori pendekatan ini, gerakan sosial dipandang sebagai upaya rasional dari kelompok untuk memperoleh pengaruh yang cukup demi memajukan kepentingan-kepentingan politik mereka. Menurut Mc Adam (Locher,

2002:265) terdapat tiga faktor determinan yang dapat mendorong keberhasilan suatu gerakan sosial yaitu kekuatan sosial, pembebasan kognitif dan peluang-peluang politik. Peluang Politik menjadi aspek yang penting karena semakin besar suatu gerakan atau organisasi gerakan memperoleh dan menggunakan kekuasaan politik maka semakin besar kemungkinan untuk dapat melakukan perubahan dalam suatu sistem politik.

- c. Teori Struktur dan Mobilisasi Sumber Daya: Teori mobilisasi sumber daya dikenalkan pertama kali oleh Anthony Oberschall dengan fokus perhatiannya kepada proses-proses sosial yang memungkinkan untuk muncul dan berhasilnya suatu gerakan, proses tersebut juga mengacu pada proses pembentukan kerumunan, asosiasi dan organisasi untuk mencapai tujuan kolektif. McCarthy dan Zald (Sukmana, 2016:198) mengatakan dalam mengembangkan pendekatan mobilisasi sumber daya maka perlu ada penekanan atas perspektif sentral yakni pertama adalah pengumpulan sumber daya baik materil maupun *non* materil untuk memahami aktivitas gerakan

sosial, kedua diperlukan minimal beberapa bentuk organisasi, ketiga menghitung keberhasilan dan kegagalan dari sebuah gerakan ada pengakuan eksplisit akan pentingnya keterlibatan individu dan organisasi dari luar kolektivitas dimana suatu gerakan sosial terjadi, keempat adalah model penawaran dan permintaan yang terkadang perlu diterapkan dalam mengkaji arus sumber daya yang bergerak menjauh dari gerakan sosial, kelima adanya kepekaan terhadap pentingnya biaya dan manfaat dalam menjelaskan individu dan keterlibatan organisasi dalam aktivitas gerakan sosial.

- d. Teori Proses *Framing*: Proses pembingkaihan merupakan proses yang digunakan oleh masyarakat dalam mereproduksi makna. Dimana menurut pernyataan Benford dan Snow (Sukmana, 2016:202) bahwa aktor gerakan sosial dipandang sebagai agen signifikan yang secara aktif terlibat dalam produksi dan pemeliharaan makna untuk konstituen gerakan, pihak lawan dan pengamat. Maka, *framing* dengan tindakan kolektif merupakan serangkaian aksi yang berorientasi

memberikan keyakinan dan makna yang menginspirasi dan melegitimasi kegiatan, maupun kampanye dari organisasi gerakansosial.

1.5.2.2 Advokasi Sosial

Advokasi adalah suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk dapat mempengaruhi dan mendesak agar terjadinya suatu perubahan kebijakan yang berpihak kepada Masyarakat. Oleh karena itu, advokasi menjadi sebuah upaya dalam perubahan sosial melalui semua saluran dan alat demokrasi, proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem demokrasi. Menurut Sheila Espine Villaluz advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan oleh perorangan dan atau kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pengertian lain tentang advokasi menurut Mansour Faqih, dkk adalah advokasi merupakan usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju.

Advokasi juga dapat disimpulkan sebagai suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk dapat mempengaruhi dan

mendesakkan perubahan dengan memberikan dukungan dan pembelaan terhadap kaum lemah ataupun terhadap mereka yang menjadi korban dari sebuah kebijakan atau ketidakadilan. Terdapat dua unsur penting dalam membangun konsep advokasi yaitu advokasi harus ditujukan untuk membela dan meringankan beban kelompok miskin dan pinggiran atau dapat dibilang bahwa advokasi harus berorientasi pada perubahan sosial. Unsur penting kedua adalah advokasi harus bisa untuk membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi masyarakat korban untuk menentukan orientasi, strategi dan merefleksi perubahan berbasis pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki.

Dalam literatur pekerjaan sosial (Sheafor dan Horejsi, DuBois dan Miley, dalam Edi Suharto; 2009) advokasi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu “Advokasi kasus” dan “Advokasi kelas”. Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Sasaran/klien dari advokasi kasus sendiri biasanya berupa individu dan keluarga dengan menggunakan teknik utama manajemen kasus.

Sedangkan Advokasi kelas menunjukkan pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau

memperoleh kesempatan. Fokus dari advokasi kelas adalah mempengaruhi ataupun melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas juga melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Advokasi kelas dapat terbagi menjadi dua bagian berdasarkan cakupannya yaitu Mezzo dan Makro. Untuk Advokasi kelas di tataran mezzo sasaran/klien dari advokasi kelas sendiri adalah kelompok formal dan organisasi. Sedangkan untuk tataran makro sasaran/kliennya adalah masyarakat lokal dan nasional. Untuk advokasi kelas tataran mezzo peran pekerja sosial berperan sebagai mediator dimana pekerja sosial berperan untuk mewakili dan mendampingi dalam mengidentifikasi masalah sosial yang dihadapi bersama, merumuskan tujuan, mendiskusikan peluang – peluang solusi, mobilisasi sumber, serta menerapkan, memonitor dan mengevaluasi rencana aksi. Serta advokasi kelas tataran mezzo menggunakan jejaring sebagai teknik utama guna melakukan koordinasi dan pengembangan pelayanan-pelayanan sosial, membangun koalisi dengan berbagai kelompok.

Advokasi kelas tataran makro peran pekerja sosial berperan sebagai aktivis dan analis kebijakan yang dimana mereka terlibat langsung dalam gerakan perubahan dan juga aksi sosial bersama

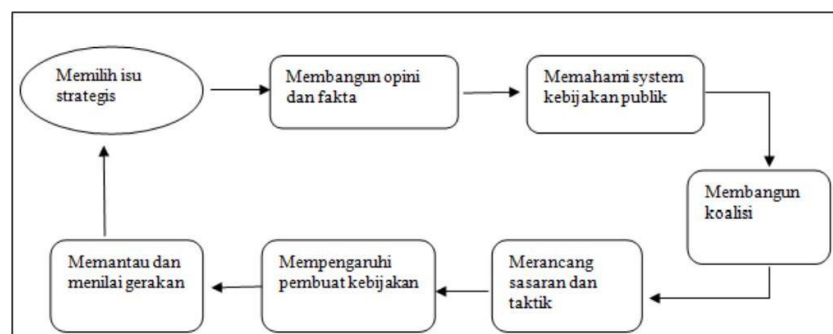
masyarakat. Peran pekerja sosial sebagai aktivis disini adalah meningkatkan kesadaran publik, melakukan mobilisasi sumber untuk mengubah kondisi – kondisi ketidakadilan, melakukan lobi dan negosiasi agar tercapai perubahan di bidang hukum, termasuk melakukan class action. Teknik utama yang digunakan dalam advokasi kelas tataran makro adalah aksi sosial dan analisis kebijakan, sedangkan peran analisis kebijakan bersifat tidak langsung dan analisis kebijakan harus melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, mengevaluasi respon pemerintah dalam menangani masalah, mengajukan opsi kebijakan dan juga memantau implementasi kebijakan. Analisis kebijakan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Prospektif: Melakukan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat sebelum penerapan kebijakan, pengajuan opsi kebijakan baru dalam rangka merespon kondisi atau masalah sosial yang dihadapi Masyarakat.
2. Pendekatan Retrospektif: Menganalisa dampak – dampak dari implementasi sebuah kebijakan.
3. Pendekatan Integratif: Pendekatan yang merupakan perpaduan antarpendekatan prospektif dan retrospektif, yaitu analisis dilakukan baik sebelum maupun sesudah kebijakan diterapkan.

Dalam melakukan upaya advokasi tentunya terdapat beberapa prinsip yang harus dipahami dan menjadi pedoman dalam merancang advokasi yang sukses. Hal ini dikarenakan tujuan dari advokasi adalah melakukan suatu perubahan, tentunya dalam perubahan tersebut akan selalu ada resistensi, oposisi dan konflik. Maka dari itu, menurut Edi Suharto (2009) prinsip – prinsip tersebut adalah:

1. Realistis: Dalam melakukan advokasi perlu melakukan pemilihan isu dan agenda yang realistis dan dapat dicapai dalam kurun waktu energi. Hal ini karena advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang jelas, spesifik dan terukur.
2. Sistematis: Advokasi memerlukan perencanaan yang akurat.

Gambar 1.1 Proses Advokasi



Sumber: Edi Suharto (2009)

Sesuai dengan gambar di atas proses advokasi dimulai dengan memilih serta mendefinisikan isu strategis dimana sebelum memulai suatu advokasi perlu adanya penetapan

terkait isu strategi yang akan di advokasikan dan juga untuk mempermudah menyusun strategi advokasi yang akan dilakukan. Lalu, isu yang telah ditetapkan tersebut dikaji dan di analisa untuk mendapatkan fakta – fakta pendukung agar dapat membangun opini publik untuk dapat mendukung gerakan yang dilakukan, setelah menganalisis terkait isu yang akan diadvokasikan, penting juga untuk memahami sistem dari kebijakan publik agar dapat memetakan peluang untuk melakukan advokasi dalam merubah kebijakan tersebut, setelah itu, bagian penting dari advokasi adalah membangun koalisi mencari kawan taktis dan kawan ideologis untuk memasifkan gerakan dan juga menekan dalam proses advokasi.

Setelah memahami isu dan memetakan lawan serta kawan taktis dan kawan ideologis, maka langkah selanjutnya adalah merancang sasaran dan taktik yang kongkrit untuk mendukung terwujudnya advokasi bersama para koalisi atau jejaring, lalu kemudian masuk kedalam tahapan advokasi yaitu mempengaruhi pembuat kebijakan baik dalam bentuk *soft diplomacy* ataupun *hard diplomacy*. Lalu, langkah berikutnya memantau dan mengevaluasi rangkaian gerakan ataupun langkah yang telah dilakukan dalam proses advokasi tersebut untuk nantinya menjadi pembelajaran dan perbaikan dalam gerakan berikutnya. Nantinya proses advokasi akan

menjadi sebuah siklus yang berulang hingga tujuan advokasi tersebut berhasil.

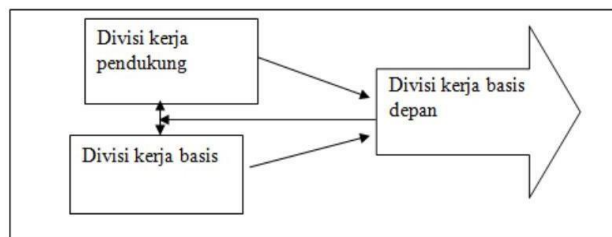
Taktis: Langkah taktis yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial dalam menjalankan perannya harus mampu untuk membangun koalisi atau aliansi atau sekutu dengan pihak lain. Sekutu sendiri dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya. Sekutu terdiri dari sekutu dekat dan sekutu jauh. Sekutu dekat juga dinamakan dengan lingkaran inti yaitu kumpulan orang atau organisasi yang menjadi pemrakarsa dalam seluruh kegiatan advokasi. Sedangkan, sekutu jauh adalah pihak – pihak yang mendukung sebuah advokasi tersebut, namun tidak terlibat secara langsung.

Lingkaran inti terdiri dari beberapa pihak yang disatukan atau bersatu atas dasar kesamaan visi dan ideologis. Organisasi lingkaran inti dapat terbagi menjadi tiga bagian berdasarkan fungsinya yaitu:

- a. Divisi kerja garis depan (*frontline unit*): Bertugas melaksanakan fungsi juru bicara, negosiator, pelobi dan terlibat dalam proses legislasi dan menggalang sekutu.
- b. Divisi kerja pendukung (*supporting unit*): Bertugas untuk menyediakan dukungan dana, logistik, informasi, data dan akses. Divisi kerja basis (*ground* atau *underground work unit*): Divisi ini merupakan dapur gerakan advokasi,

dimana bertugas untuk membangun basis massa, pendidikan politik kader danmemobilisasi aksi.

Gambar 1.2 Lingkaran Kerja Inti



Sumber: Edi Suharto (2009)

Untuk mendukung tercapainya tujuan advokasi setiap divisi tersebut harus saling mendukung dan saling melengkapi. Mekanisme terbaik untuk ketiganya adalah adanya rangkaian pertemuan koordinasi berkala teteap untuk dapat menyepakati bersama pembagian tugas, advokasi sumber daya, penjadwalan kegiatan, menentukan langkah dan proses pelaksanaan dan masih banyak lagi. Diperlukan adanya pola kepemimpinan kolektif dalam suatu jaringan kerja advokasi dimana semua pihak bekerja sebagai mitra kerja yang setara dan sinergi.

3. Jaringan Sekutu: Kegiatan advokasi memerlukan satu kekuatan yang lebih besar, yaitu sebuah tim yang dibangun dengan kerjasama antar kelompok masyarakat yang terlibat maupun yang peduli dengan permasalahan yang ada. Sekutu dalam advokasi terdiri atas perseorangan, kelompok, atau organisasi yang memiliki sumber daya

seperti keahlian, pengaruh, informasi, akses, prasarana, sarana dan dana, kemudian sekutu tersebut harus terlibat aktif langsung dalam mendukung dengan mengambil peran, fungsi, atau tugas dalam rangkaian kegiatan advokasi. Menurut buku “Merubah kebijakan Publik” yang ditulis oleh tim LBH Bandung, terdapat beberapa ciri tertentu dalam membangun aliansi bersama, yaitu fokus pada tujuan dan sasaran advokasi yang disepakati bersama, lalu menetapkan dan menggarap satu atau beberapa isu yang disepakati bersama, adanya pembagian peran dan tugas yang jelas antara para pihak yang terlibat, terbentuk atas hasil atau dampak dari adanya pertentangan dalam masyarakat, memanfaatkan konflik yang muncul sebagai upaya konstruktif dalam menjaga dinamika, memungkinkan lahirnya bentuk – bentuk kerjasama baru yang lebih berkembang, mekanisme komunikasi yang baik dan lancar, serta dibentuk dengan jangka waktu jelas.

4. Strategis: Dalam melakukan advokasi perlu digunakannya strategi agar tujuan dari advokasi tersebut dapat terwujud. Perlu adanya memetakan dan mengidentifikasi kekuatan yang kita miliki ataupun kekuatan yang ‘lawan’ kita miliki.
5. Berani: Tentu dalam melakukan sebuah perubahan diperlukannya keberanian. Maka dari itu, jadikan isu dan

strategi sebagai motor gerakan dan harus tetapberpijak pada agenda yang telah disepakati bersama.

6. Melobi: Lobi adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu dalam upaya memperolehdukungan dari pihak lain yang dianggap berpengaruh atau memiliki wewenang sehingga kepentingan tersebut dapat tercapai. Dalam hal advokasiberarti lobi dilakukan untuk mempengaruhi para pimpinan organisasin atau pemerintah agar dapat mencapai tujuan advokasi. Lobi mengandung dua elemen utama yaitu kontak dan pengaruh.
7. Mempengaruhi Pendapat Umum: Mempengaruhi pendapat umum menjadi hal yang penting dalam advokasi guna mendapat dukungan publik. Bentuk – bentuk kegiatan dalam proses ini sangat beagam mulai dari kampanye untuk membangun kesadaran publik, penggalangan dukungan, pembentukan basis, pengerahan kekuatan massa, hingg aksi masa.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.2 Operasional Konsep

Teori	Indikator	Sub - Indikator
Advokasi Sosial	Realistis	Pemilihan isu dan agenda yang jelas, spesifik dan terukur
	Sistematis	Proses Perencanaan yang kuat sesuai dengan Proses Advokasi yaitu: <pre> graph TD A([Memilih isu strategis]) --> B[Membangun opini dan fakta] B --> C[Memahami system kebijakan publik] C --> D[Membangun koalisi] D --> E[Merancang sasaran dan taktik] E --> F[Mempengaruhi pembuat kebijakan] F --> G[Memantau dan menilai gerakan] G --> A </pre>
	Jaringan Sekutu	Satu kekuatan yang dibangun dengan kerjasama antar kelompok masyarakat yang memiliki sumber daya seperti keahlian, basis massa, akses dan informasi, serta mengambil peran aktif.
	Strategis	Strategi untuk proses advokasi dengan memetakan kekuatan yang dimiliki dan kekuatan 'lawan' serta menyusun langkah taktis.
	Berani	Keberanian untuk mendukung sebuah perubahan dengan menjadikan isu dan strategi sebagai landasan bersama.
	Melobi	Upaya pendekatan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu dalam upaya memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap berpengaruh atau memiliki wewenang sehingga kepentingan tersebut dapat tercapai. Hal ini mengandung element kontak dan pengaruh untuk mendukung advokasi tersebut.
	Mempengaruhi Pendapat Umum	Mengumpulkan basis masa dengan meningkatkan kesadaran publik melalui tulisan hingga aksi massa.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Penelitian tentang Gerakan Perempuan Mahardhika dalam Advokasi Sosial Pemenuhan Hak – Hak Normatif Buruh Perempuan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2013) metode kualitatif ialah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, di mana instrumen kuncinya ialah peneliti, pengambilan sampel sumber data dengan *purposive sampling*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, serta temuan penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian dalam bentuk kata – kata dan gambar (Sugiyono, 2013). Maka dari itu, penelitian ini akan menjelaskan permasalahan penelitian secara terperinci yang berkaitan dengan langkah advokasi yang dilakukan oleh Perempuan Mahardhika dalam upaya menuntut kesetaraan dan keadilan bagi para buruh perempuan.

1.7.2 Situs dan Subjek Penelitian

Situs pelaksanaan penelitian ini sebagai sarana pendukung dalam proses pengumpulan informasi dan fakta yang relevan untuk nantinya mempengaruhi hasil analisis penelitian. Situs yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah Jakarta Utara.

Subjek pada penelitian ini adalah informan yang dapat memberikan

informasi ataupun penjelasan terkait topik yang akan di teliti. Dalam memilih informan yang akan dijadikan sebagai subjek, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sumber informasi berdasarkan pertimbangan tertentu, yang mana sampelnya ialah orang – orang yang dianggap mempunyai pengetahuan terdalam mengenai apa yang diharapkan oleh peneliti atau orang tersebut merupakan penguasa sehingga memudahkan peneliti mengkaji objek yang akan ditelitinya (Sugiyono, 2013). Berdasarkan hal tersebut, subjek penelitian yang bertanggung jawab dalam advokasi dan pemenuhan hak – hak buruh perempuan pada industri garmen di KBN Cakung meliputi :

- a. Perempuan Mahardhika
- b. Buruh perempuan di KBN Cakung
- c. Buruh perempuan korban pelecehan seksual (Penyintas)
- d. Pengelola KBN Cakung
- e. DPRD Komisi B

1.7.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, terdapat dua jenis data yang dapat digunakan untuk penelitian. Pertama adalah data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari lapangan. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi. Salah satu sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Perempuan Mahardhika, Buruh Perempuan di KBN Cakung, serta Pengelola KBN Cakung.

Selain data primer, terdapat pula data sekunder yang mana data sekunder didapatkan melalui berkas – berkas ataupun data yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder sendiri dapat berupa buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Contoh sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil kajian dari Perempuan Mahardhika.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data dan mengolah data yang telah didapatkan. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data antara lain :

1.7.4.1 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian karena dengan wawancara memungkinkan penulis untuk mendapatkan jawaban langsung dari narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang sedang diteliti. Dalam wawancara, penulis dapat memberikan pertanyaan yang relevan dengan garis besar permasalahan yang sedang dihadapi, sekaligus mendapatkan saran dan pendapat dari narasumber tersebut. Penulis juga mendapatkan *insight* dan pemahaman yang lebih dalam mengenai topik penelitian melalui sudut pandang narasumber yang berpengalaman atau berkompeten dalam bidang yang relevan.

1.7.4.2 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung yang disertai dengan pencatatan kepada situasi, kejadian, atau peristiwa di lapangan (Raco, 2010). Penulis akan melakukan melakukan pengamatan dan juga mencatat serta mengabadikan hasil pengamatan langsung dari lokasi penelitian, yakni dengan melihat bagaimana kondisi lingkungan kerja buruh perempuan di KBN Cakung.

1.7.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan guna meninjau data historis. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan yang ditulis oleh seseorang, gambar, atau karya monumental (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti mencari dokumen tertulis seperti buku, jurnal, catatan, peraturan, laporan ataupun sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Dengan mengacu pada dokumen – dokumen tersebut, penulis dapat memperoleh informasi yang relevan dan mendukung argumen yang diajukan dalam penelitian.

1.7.4.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses dalam penelitian yang bertujuan untuk menyusun dan mengolah data penelitian. Melalui analisis data, peneliti dapat mengidentifikasi tema – tema yang muncul dan mengembangkan suatu teori berdasarkan data yang

diperoleh. Menurut (Miles dan Huberman, 1992) terdapat tiga jalur analisis data kualitatif yang juga digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi atau penyusutan data merupakan proses analisis data yang dilakukan dengan proses pemilihan, penggolongan dan memusatkan perhatian pada penyederhanaan dari seluruh data yang dikumpulkan agar sesuai dengan topik penelitian, sehingga dapat membuat suatu kesimpulan akhir.
- b. Penyajian data adalah data yang sudah didapatkan ditampilkan dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk teks. Bentuk pemaparan data adalah teks yang bersifat naratif. Data yang ditampilkan atau yang disajikan oleh peneliti dengan sebaik mungkin sesuai dengan fakta yang sebenar – benarnya. Selain itu, akan ditampilkan pula gambar dan juga dokumen – dokumen pendukung untuk menguatkan argumen dari penelitian ini.
- c. Penarikan kesimpulan merupakan teknik analisis data yang harus dipikirkan oleh peneliti secara terus menerus selama melakukan penelitian. Diawali dengan proses wawancara, observasi, hingga dokumentasi peneliti sudah harus mulai untuk menarik benang merah dari hasil penelitian ini. Kesimpulan – kesimpulan pada tahap awal ini dilakukan dengan pemahaman yang longgar tetap terbuka dan skeptis yang terpenting sudah menemukan

gambaran awal terlebih dahulu mengenai kesimpulan dari penelitian. Setelah dilakukannya reduksi dan penyajian data barulah kesimpulan tersebut ditingkatkan menjadi lebih rinci dan mengakar. Setelah membuat kesimpulan peneliti akan meninjau ulang kembali sesuai dengan catatan lapangan yang ada dan melihat data – data dari penelitian untuk memastikan kembali kesimpulan yang dibuat telah mencakup semua hal dari penelitian ini.

1.8 Validitas Data

Validitas data sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk dapat mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini. Hal ini berarti, validitas memiliki makna sebagai ketepatan alat ukur. Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui kevalidan instrumen yang telah digunakan dalam penelitian. Validitas data dapat dipertanggungjawabkan serta dijadikan pondasi kuat dalam menarik kesimpulan. Untuk meningkatkan keabsahan, penulis dapat meminimalisir subjektivitas melalui triangulasi. Triangulasi merupakan kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori dan teknik metodologis dalam suatu penelitian yang terjadi atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena memungkinkan untuk mendapat tangkapan realitas secara lebih valid. Triangulasi data ditempuh melalui pemanfaatan sesuatu di luar data untuk keperluan pembandingan dan untuk meningkatkan kuantitas penilaian. Tipe triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi data dimana peneliti menggunakan beragam sumber data dalam suatu penelitian (Denzin, 1978). Selain itu, triangulasi dapat dilakukan dengan membandingkan perspektif informan dari berbagai sudut pandangannya.

